

Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal

Tanggal : Senin , 28 September 2020
Media : Investor Daily
Halaman : 23
Wartawan : pri
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Tongam Lumban Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi OJK)
Rubrik : Money & Banking
Topik : Fintech Ilegal

Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal

JAKARTA—Satgas Waspada Investasi (SWI) per September 2020 telah menutup 126 entitas *fintech peer to peer* (P2P) *lending* ilegal. Selain itu, SWI juga menutup 32 kegiatan investasi ilegal dan 50 perusahaan gadai ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, tawaran dari *fintech lending* ilegal dan investasi tanpa izin masih banyak bermunculan di masyarakat dan mengincar kalangan yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran pinjaman dari entitas yang tidak memiliki izin sesuai usahanya. "Kami masih menemukan penawaran *fintech lending* ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. *Fintech lending* dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukanlah solusi bagi masyarakat," kata Tongam melalui keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Dia menilai, pinjaman dari *fintech lending* ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Kegiatan ilegal itu meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. Semua temuan SWI itu identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler. Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas *fintech lending* ilegal tersebut kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

SWI juga mengapresiasi kebijakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan *fintech lending* yang terdaftar dan berizin OJK melakukan penawaran melalui SMS sesuai dengan ketentuan OJK. Dengan demikian, bisa dipastikan jika ada penawaran pinjaman dana *fintech lending* melalui SMS berarti itu dilaku-

kan oleh *fintech lending* ilegal yang sebaiknya dihindari.

Pasal 43 pada POJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan larangan melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna. Adapun total *fintech ilegal* yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020 mencapai 2840 entitas.

Kegiatan Tanpa Izin

Sementara itu, SWI turut menghentikan 32 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Sejumlah entitas itu dinilai melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi *website* entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah *website* tersebut resmi milik entitas yang berizin.

Dari 32 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan seperti, dua entitas perdagangan berjangka/*forex* ilegal dan tiga entitas penjualan langsung (*direct selling*) ilegal. Kemudian dua investasi *cryptocurrency* ilegal, serta 25 entitas dengan kegiatan usaha tanpa izin lainnya.

Tongam menuturkan, salah satu entitas yang diminta ditutup adalah aplikasi Alimama Indonesia (alimma.qdhtml.net). Entitas tersebut belakangan santer diberitakan karena diduga melakukan penipuan dengan modus penghimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja.

Dengan demikian, dia mengemukakan, SWI mengimbau kepada masyarakat sebelum melakukan investasi untuk memahami sejumlah pendekatan. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan

kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Serta ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, SWI juga menemukan 50 kegiatan gadai swasta tanpa izin. Sejumlah entitas itu tidak mengantongi izin otoritas terkait sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 31/2016 tentang Usaha Pergadaian. Dalam ketentuan POJK itu, seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu dua tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019.

Pada tahun lalu, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 68 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020 menjadi 143 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.

SWI meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta ilegal. Jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapuangmu.ojk.go.id.

Satgas pun meminta agar masyarakat bisa berkonsultasi ataupun bertanya kepada OJK mengenai *fintech lending* ataupun tawaran investasi yang beredar ke Kontak OJK 157, WA 081157157157. Selain itu masyarakat juga dapat menghubungi via email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (pri)